

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031)3095361 / Fax. (031)3095361

E-mail : dinsos@bangkalankab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. SETIJABUDHI NK, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196003011985021004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	22
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
4.1 Program dan Kegiatan	
 BAB V PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 209 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2021 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2021 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 serta evaluasi kinerja di tahun 2020 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2019-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2021 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program (outcome) dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Sosial									
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	912 org	1942 org	626 org	626 org	100	750 org	3.318 org	3,6
1.06.15.2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Peserta pelatihan dan stimulan untuk keluarga miskin (perkotaan)	48	90 org	30 org	30 org	100	40 org	160 org	3,3

1.06.15.6	Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peserta pelatihan dan stimulan bagi fakmis (pesisir)	48	0 org	28 org	28 org	100	40 org	68 org	1,4
1.06.15.8	Fasilitasi Pemenuhan kebutuhan Dasar bagi keluarga Miskin	Bantuan sembako untuk keluarga miskin	766	1.852 pkt	540 pkt	540 pkt	100	630 pkt	3.022 pkt	3,9
1.06.15.9	Pengadaan sarana Pendukung usaha bagi Keluarga Miskin	Sarpras pendukung usaha bagi keluarga miskin (pedesaan)	48	0 orgt	28 org	28 org	100	40 org	68 org	1,4
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan tanggap bencana alam dan bencana sosial	3 keg	2 keg	3 keg	3 keg	100	3 keg	8 keg	2,7
1.06.16.10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Distribusi air bersih untuk daerah rawan kekeringan	14 kec	14 kec	14 kec	0	0	14 kec	14 kec	1,0
1.06.16.12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH)	Koordinasi pelayanan keluarga miskin terhadap kesehatan dan pendidikan	18 kec	0	18 kec	18 kec	100	18 kec	36 kec	2,0
1.06.16.13	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar (pangan) Bagi Korban Bencana	Bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial	2 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0	2 keg	2 keg	0,0

1.06.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	34 org	98 org	0 org	0 org	0	19 org	117 org	3,4
1.06.17.8	Bimbingan motivasi dan bantuan stimulan bagi Anak terlantar	Peserta pembinaan serta stimulan untuk anak terlantar	34 org	98 org	0 org	0 org	0	19 org	117	3,4
1.06.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Paca yang mendapatkan pelayanan sosial	30 org	100 org	0 org	0 org	0	19 org	119 org	4,0
1.06.18.6	Bimbingan Motivasi dan bantuan stimulan untuk para penyandang cacat dan Trauma	Bimbingan dan stimulan untuk PACA	30 org	100 org	0 org	0 org	0	19 org	119	4,0
1.06.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	3 keg	3,0
1.06.20.6	Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)	Razia PMKS	5 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	5 kali	9	1,8

1.06.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah panti asuhan/yayasan yang mendapatkan bantuan/pembinaan	6 yys	1 yys	0 yys	0 yys	100	4 yys	5	0,8
1.06.19.4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pembinaan dan stimulan untuk panti asuhan	6 yys	1 yys	0 yys	0 yys	0	0 yys	1	0,2
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelembagaan kesos	3 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	2 keg	4 keg	1,3
1.06.21.5	Sosialisasi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peserta sosialisasi	61 org	0	0	0	0	100 org	100	1,6
1.06.21.6	Penyuluhan dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)	Data PMKS	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	3	3,0
1.06.21.8	Validasi Dan Verifikasi Data kemiskinan	Database kemiskinan	1 dok	0	1 dok	0 dok	0	1 dok	1	1,0
1.06.22	Program Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan kesos	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	2 keg	2 keg	1,0

1.06.22.4	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan (TMP)	Rehab pagar TMP	1 lok	1 lok	1 lok	1 lok	100	1 keg	3	3,0
1.06.22.5	Fasilitasi KOMDA Lansia	Operasional Komda Lansia	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	3	3,0
0.00	Urusan Kesekretariatan									
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1,0
0.00.2.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung Kantor	Perbaikan ruangan tempat kerja	1 lok	0 lok	1 lok	1 lok	100	1 lok	1 lok	1,0
0.00.2.47	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	7 jenis	2 jenis	6 jenis	6 jenis	100	7 jenis	7 jenis	1,0
0.00.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1,0
0.00.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	4 dok	4,0

0.00.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	4	4,0
0.00.7	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	1,0
0.00.7.1	Penunjang Operasional OPD	Tersedianya sarana operasional OPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	1,0
0.00.7.18	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Peserta peringatan hari kesaktian	150 org	150 org	150 org	150 org	100	150 org	150 org	1,0
0.00.7.20	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi bangkalan	Keikutsertaan dalam pameran	1 lok	1 lok	1 lok	1 lok	100	1 lok	1 lok	1,0
0.00.7.21	Fasilitasi Peringatan Hari Pahlawan	Peserta peringatan hari Pahlawan	150 org	150 org	150 org	150 org	100	150 org	150 org	1,0
0.00.7.49	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen Revisi Renstra	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1,0
0.00.7.60	Penyusunan Dan Evaluasi Renja OPD	Renja OPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	1,0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS yang ditangani	1	6,69	7,81	8,93	1	0	6,69	7,81	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Kompleksitas permasalahan PMKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

N o.	Rancangan Awal RKPD dari data Renstra					Hasil Analisis Kebutuhan dari data RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegi atan	Lok asi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	2,8	452.634.875	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	2,8	303.951.250	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtera an Sosial
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Bkl	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhabilitasi	64 orang	169.515.500	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Bkl	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab	64 orang	124.470.000	
2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Bkl	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	127 orang	183.150.000	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Bkl	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	127 orang	100.000.000	
3	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Bkl	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	40 orang	99.969.375	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Bkl	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	40 orang	79.481.250	
B	Program Pemberdayaa n Sosial		Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	1.035.316.425	Program Pemberdayaa n Sosial		Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	805.606.150	Bidang Pemberdaya an Sosial
4	Penanganan Fakir Miskin	Bkl	Jumlah fakir miskin yang dibina	132 orang	175.704.375	Penanganan Fakir Miskin	Bkl	Jumlah fakir miskin yang dibina	132 orang	133.957.600	

			Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	695 orang	173.250.000			Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	695 orang	89.698.700	
			Dokumen penerima rastra	1 dokumen	221.347.500			Dokumen penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP)	1 Dokumen	241.849.200	
5	Kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Bkl	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	51.975.000	Kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Bkl	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	49.543.300	
			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	92.114.550			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	80.944.050	
6	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Bkl	Jumlah lembaga yang dibangun	6 yayasan	80.325.000	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Bkl	Jumlah lembaga yang dibangun	6 yayasan	0	
								Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu	1 Dokumen	45.000.000	
			Jumlah TSKK yang terbina	18 orang	75.600.000			Jumlah TSKK yang terbina	18 orang	129.613.300	
7	Pelestarian terhadap nilai-nilai keahlawanan	Bkl	Peserta sosialisasi nilai-nilai keahlawanan	53 orang	165.000.000	Pelestarian terhadap nilai-nilai keahlawanan	Bkl	Peserta sosialisasi nilai-nilai keahlawanan	50 orang	35.000.000	
C	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	2.497.325.336	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	965.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
8	Perlindungan sosial korban bencana alam	Bkl	persentase korban bencana alam yang dibantu	100%	215.902.500	Perlindungan sosial korban bencana alam	Bkl	persentase korban bencana alam yang dibantu	100%	138.050.000	

			Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	89 desa	95.645.000			Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	89 desa	86.950.000	
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bkl	Dokumen penerima KPM	1 Dokumen	173.448.275	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bkl	Dokumen penerima KPM	1 Dokumen	198.077.300	
			Jumlah penerima JKN	479.000	276.215.500			Jumlah penerima JKN	479.000	57.248.131	
			Data kemiskinan	1 Dokumen	1.694.864.061			Data kemiskinan	1 Dokumen	434.674.569	
10	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Bkl	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	41.250.000	Perlindungan sosial korban bencana sosial	Bkl	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	50.000.000	
D	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	175.381.250	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	127.550.000	Bidang Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah LKS yang dibantu	6 lembaga	66.171.875	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah LKS yang dibantu	6 lembaga	68.350.000	
12	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Bkl	Jumlah PSM yang telah dibina	55 orang	68.509.375	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Bkl	Jumlah PSM yang telah dibina	55 orang	29.600.000	
13	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah PSKS yang dibina	22 orang	40.700.000	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bkl	Jumlah PSKS yang dibina	22 orang	29.600.000	
E	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	2.208.212.561	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	1.927.974.600	Kesekretariatan

14	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Dinsos	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	7 jenis	307.741.739	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Dinsos	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	7 jenis	199.208.400	
			Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	9 jenis	1.311.436.559			Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	9 jenis	1.134.800.200	
15	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Dinsos	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	30 kali	20.000.000	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Dinsos	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	30 kali	10.000.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	80 kali	145.000.000			Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	80 kali	135.000.000	
16	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	14 dokumen	5.500.000	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	14 dokumen	10.000.000	
17	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	3 jenis	108.580.538	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	3 jenis	84.300.500	
			Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	1 unit	25.000.000			Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	1 unit	35.000.000	
18	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Dinsos	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	0	0	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Dinsos	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	0	0	
			Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	1 unit	130.312.744			Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	1 unit	94.476.869	
19	Peningkatan Disiplin Pegawai		Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100 buah	45.377.981	Peningkatan Disiplin Pegawai		Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100 buah	45.377.981	

20	Peningkatan kapasitas aparatur	Dinsos	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	9 orang	36.750.000	Peningkatan kapasitas aparatur	Dinsos	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	100 orang	112.000.000	
21	Penyusunan perencanaan dan informasi PD		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	25.437.500	Penyusunan perencanaan dan informasi PD		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	25.000.000	
		Dinsos	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	4 dokumen	4.000.000		Dinsos	Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	4 dokumen	4.000.000	
			Jumlah data dan informasi PD	3 data	6.000.000			Jumlah data dan informasi PD	3 data	3.500.650	
22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Dinsos	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	8 laporan	3.444.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Dinsos	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	8 laporan	3.280.000	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 dokumen	5.250.000			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	
23	Penyusunan laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	0 Dokumen	0	Penyusunan laporan keuangan		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	0 Dokumen	0	
			Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	66 laporan	2.608.200			Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	66 laporan	3.280.000	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.085.800			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	5.000.000	

24	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi		Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	2 kegiatan	19.687.500	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi		Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	2 kegiatan	18.750.000	
					6.368.870.447					4.130.082.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 didasarkan pada program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil dan program-program pro rakyat telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian kecepatan penurunan kemiskinan mengalami perlambatan.

Dalam rangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif; dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Tujuan Renja Dinas Sosial

1. Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan

Sasaran Renja Dinas Sosial

1. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS
2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2021	2022			2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS	567.111	566.999	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	% PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93	10,04	
				Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan internal layanan kesekretariatan	100	100	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

4.1. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2021 :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.	Urusan Sosial								
1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani		2,8	303.951.250	APBD		3	678.952.313
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	<i>Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab</i>	Bkl	64 orang	124.470.000	APBD		67	254.273.250
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	<i>Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi</i>	Bkl	127 orang	100.000.000	APBD		133	274.725.000
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	<i>Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhab</i>	Bkl	40 orang	79.481.250	APBD		42	149.954.063
1.06.01.23.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	0,6	805.606.150	APBD		0,6	1.242.379.710

1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	<i>Jumlah fakir miskin yang dibina</i>	Bkl	132 orang	133.957.600	APBD		139	210.845.250
		<i>Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	Bkl	695 orang	89.698.700	APBD		729	207.900.000
		<i>Dokumen penerima bantuan sosial pangan (BSP)</i>	Bkl	1 dokumen	241.849.200	APBD		1	265.617.000
1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	<i>Jumlah sarana yang dipelihara</i>	Bkl	1 lokasi	49.543.300	APBD		1	62.370.000
		<i>Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional</i>	Bkl	2 kegiatan	80.944.050	APBD		2	110.537.460
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	<i>Jumlah lembaga yang terdaftar dan terbina</i>	Bkl	6 yayasan	0	APBD		6	111.510.000
		<i>Jumlah TSKS yang terbina</i>	Bkl	18 orang	129.613.300	APBD		18	75.600.000
		<i>Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam system layanan rujukan terpadu (SLRT)</i>	Bkl	1 dokumen	45.000.000	APBD		1	100.000.000
1.06.01.23.04	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	<i>Peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan</i>	Bkl	50 orang	35.000.000	APBD		55	198.000.000
1.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Bkl	100	965.000.000	APBD		100	3.063.724.330
1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	<i>persentase korban bencana alam yang dibantu</i>	Bkl	100%	138.050.000	APBD		100	319.535.700
		<i>Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu</i>	Bkl	89 desa	86.950.000	APBD		89	143.467.500
1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<i>Dokumen penerima KPM</i>	Bkl	1 dokumen	198.077.300	APBD		1	260.172.413

		<i>Jumlah penerima JKN</i>	Bkl	479.000 orang	57.248.131	APBD		479.000	414.323.250
		<i>Data kemiskinan</i>	Bkl	1 dokumen	434.674.569	APBD		1	1.864.350.467
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	<i>% korban bencana sosial yang dibantu</i>	Bkl	100%	50.000.000	APBD		100%	61.875.000
1.06.01.25.	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		6	127.550.000	APBD		6	192.919.375
1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah LKS yang dibantu</i>	Bkl	6 lembaga	68.350.000	APBD		6	72.789.063
1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	<i>Jumlah PSM yang telah dibina</i>	Bkl	55 orang	29.600.000	APBD		58	75.360.313
1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<i>Jumlah PSKS yang dibina</i>	Bkl	22 orang	29.600.000	APBD		23	44.770.000
0.00.16.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Dinsos	100	1.927.974.600	APBD		100	2.325.277.887
0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	<i>Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan</i>	Bkl	7 jenis	199.208.400	APBD		7	348.217.227
		<i>Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan</i>	Bkl	9 jenis	1.134.800.200	APBD		9	1.351.912.047
0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	<i>Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan</i>	Bkl	30 kali	10.000.000	APBD		35	23.250.000
		<i>Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan</i>	Bkl	80 kali	135.000.000	APBD		80	150.000.000
0.00.16.03.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun</i>	Dinsos	14 dokumen	10.000.000	APBD		14	5.775.000

0.00.16.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	<i>Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara</i>	Dinsos	3 jenis	84.300.500	APBD		3	113.259.565
		<i>Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara</i>	Dinsos	1 unit	35.000.000	APBD		1	27.000.000
0.00.16.05.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	<i>Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan</i>	Dinsos	0	0	APBD		2	143.344.018
		<i>Jumlah prasarana aparatur yang diadakan</i>	Dinsos	1 unit	94.476.869	APBD		0	0
0.00.16.06.	Peningkatan Disiplin Pegawai	<i>Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan</i>	Dinsos	100 buah	45.377.981	APBD		100	47.646.880
0.00.16.07.	Peningkatan kapasitas aparatur	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar</i>	Dinsos	100 orang	112.000.000	APBD		11	38.734.500
0.00.16.08.	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	<i>Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun</i>	Dinsos	3 dokumen	25.000.000	APBD		2	25.709.375
		<i>Jumlah dokumen penganggaran PD yang tersusun (RKA dan DPA)</i>	Bkl	4 dokumen	4.000.000	APBD		4	4.500.000
		<i>Jumlah data dan informasi PD</i>	Dinsos	3 data	3.500.650	APBD		3	7.000.000
0.00.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	<i>Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)</i>	Dinsos	8 laporan	3.280.000	APBD		8	3.478.700
		<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun</i>	Dinsos	1 dokumen	5.000.000	APBD		1	5.650.000
0.00.16.10.	Penyusunan laporan keuangan	<i>Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester / prognosis / akhir tahun</i>	Dinsos	0 dokumen	0	APBD		0	0

		<i>Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan / bulanan / triwulanan / semesteran</i>	Dinsos	66 laporan	3.280.000	APBD		66	2.738.610
		<i>Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun</i>	Dinsos	1 dokumen	5.000.000	APBD		1	6.390.090
0.00.16.11.	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten / Provinsi / Nasional dan Hari Besar Lainnya	<i>Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi</i>	Bkl	2 kegiatan	18.750.000	APBD			20.671.875
	JUMLAH				4.130.082.000				7.450.639.240

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2021 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pemberdayaan Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2021, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan

manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksekse-ekses yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan dini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2021 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2021.

Bangkalan,

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

Drs. SETIJABUDHI NK, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196003011985021004